

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

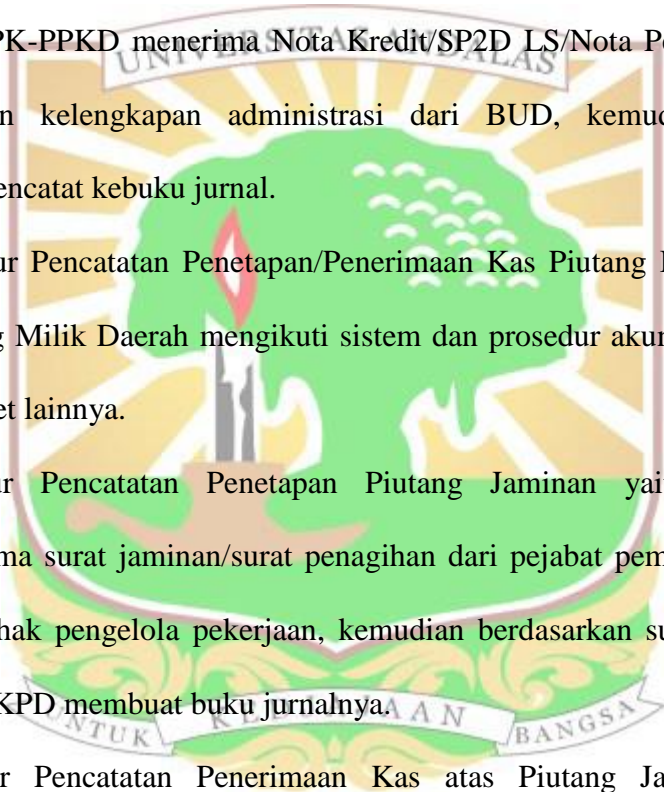
Prosedur pencatatan piutang merupakan langkah-langkah pekerjaan yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi pencatatan piutang dalam suatu instansi pemerintah.

Pada DPKAD Kota Bukittinggi, ada beberapa pencatatan piutang. Pada masing-masing pencatatan piutang terdapat prosedur tersendiri seperti yang dijelaskan dibawah ini:

- 5.1.1 Prosedur Pencatatan Piutang PAD yaitu PPK SKPD menerima SKPD/SKRD/SKPKB/SKRKB/Dokumen lain yang di persamakan sebagai ketetapan dari pengelola pendapatan SKPD kemudian PPK SKPD mencatat ke buku jurnal.
- 5.1.2 Prosedur Pencatatan Penetapan Bagian Lancar Tagihan yaitu PPK PPKD menerima penetapan bagian lancar tagihan dari BUD yang kemudian PPK PPKD mencatat ke buku jurnal.
- 5.1.3 Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas Bagian Lancar Tagihan yaitu PPK-PPKD menerima nota kredit dan dokumen bagian lancar tagihan dari BUD, kemudian PPK-PPKD mencatat ke buku jurnal.
- 5.1.4 Prosedur Pencatatan Pemberian Uang Muka yaitu:
 - a. Prosedur yang digunakan untuk PPK-SKPD yaitu PPK-SKPD menerima SP2D LS kelengkapan administrasi dari BUD dan kemudian PPK-SKPD mencatat ke buku jurnal
 - b. Prosedur yang digunakan untuk PPK-PPKD yaitu PPK-PPKD

menerima Nota Kredit akibat adanya pemindahbukuan Rekening Kas Daerah kepada pihak ketiga kemudian PPK PPKD mencatat ke buku jurnal.

- 5.1.5 Prosedur Pencatatan Pengambilan Uang Muka ada dua pencatatan yaitu :
- a. PPK-SKPD menerima Nota Kredit/SP2D LS dan kelengkapan administrasi dari BUD, kemudian PPK-SKPD mencatat ke buku jurnal,
 - b. PPK-PPKD menerima Nota Kredit/SP2D LS/Nota Pemindahbukuan dan kelengkapan administrasi dari BUD, kemudian PPK-PPK mencatat ke buku jurnal.
- 5.1.6 Prosedur Pencatatan Penetapan/Penerimaan Kas Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah mengikuti sistem dan prosedur akuntansi aset tetap dan aset lainnya.
- 5.1.7 Prosedur Pencatatan Penetapan Piutang Jaminan yaitu PPK-SKPD menerima surat jaminan/surat penagihan dari pejabat pembuat komitmen atau pihak pengelola pekerjaan, kemudian berdasarkan surat penagihan PPK-SKPD membuat buku jurnalnya.
- 5.1.8 Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas atas Piutang Jaminan melalui Bendahara Penerimaan terbagi dua:
- a. PPK-SKPD menerima TBP atas piutang jaminan dari bendahara penerimaan.
 - b. PPK-PPKD menerima Nota Kredit/SP2D LS atau piutang jaminan dari BUD.



5.1.9 Prosedur Pencatatan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yaitu pengelola administrasi PAD menyampaikan perhitungan penyisihan piutang dalam bentuk laporan piutang kepada PPK SKPD dan PPK-SKPD mencatatnya kedalam buku jurnal.

5.1.10 Piutang pada DPKAD Kota Bukittinggi pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dalam neraca DPKAD Kota Bukittinggi tahun 2015 dan 2014 dibawah ini, terlihat bahwa peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015. Pada tahun 2014 Piutang Pendapatan Kota Bukittinggi adalah Rp.12.145.868.229,00 sedangkan tahun 2015, piutang pendapatan meningkat sebanyak Rp.879.434.270 yaitu berjumlah Rp. 13.025.302.499,00. Hal tersebut menandakan pengelolaan piutang pada Kota Bukittinggi mulai mengalami peningkatan kearah yang lebih baik, sehingga pendapatan daerah dibidang pendapatan piutang dapat meningkat.

